



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PENGUSAHA
RUMAH MAKAN TERHADAP KESADARAN HUKUM
MENYETORKAN PAJAK PEMBANGUNAN I**

Oleh :

DWIPOERNOMO, SH. MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1999**

**Mengetagui :
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Noor Bahardjo, SH. MH

**Makalah didiskusikan pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Mei 1999**



PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KESADARAN HUKUM MENYETORKAN PAJAK PEMBANGUNAN I

Oleh : Dwi Poernomo

A. Pendahuluan

Pengusaha rumah makan sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan atau pedoman perihal tingkah laku untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pedoman atau patokan itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah selalu berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang tata cara berperilaku di dalam masyarakat, menegaskan secara nyata-nyata model kelakuan mana yang seharusnya di jauhi atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana orang tidak lagi diijinkan berbuat.

Pajak Pembangunan I dikenakan kepada seluruh subyek pajak yang makan dan minum di rumah makan. Pengusaha rumah makan/pengelola rumah makan mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu tingkat pendidikan rendah, tingkat pendidikan sedang, dan tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting kiranya untuk mengadakan penelitian mengenai ada atau tidak pengaruh tingkat pendidikan pengusaha rumah makan dalam menyetorkan Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II Semarang. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk makalah untuk didiskusikan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

“ Apakah Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Di Kodya Dati II Semarang mempengaruhi kesadaran hukum dalam menyetor Pajak Pembangunan I “

C. Teori-Teori

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti Surat Paksa dan Sita dan juga Penyederhanaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan Retribusi (*Brotodihardjo, 1986 : 5-6*)

Untuk lebih rincinya dikemukakan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Pajak Daerah umumnya dan Pajak Pembangunan I khususnya, yaitu ::

1. Pajak Pembangunan I adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari semua pembayaran-pembayaran di rumah makan dan di rumah-rumah penginapan
2. Rumah makan adalah perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya
3. Obyek Pajak Pembangunan I adalah yang menjadi Obyek Pajak Pembangunan I adalah setiap pembayaran semua pembelian makanan atau minuman di Rumah Makan
4. Subyek Pajak Pembangunan I adalah yang menjadi subyek Pajak Pembangunan I adalah setiap orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada Pengusaha Rumah Makan.

Adapun kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi para Pemilik Rumah Makan adalah sebagai berikut :

1. Menarik Tarif Pajak Pembangunan I dari kawasan
2. Memungut Pajak Pembangunan I sebesar 10 % (sepuluh persen)
3. Memenuhi tata cara pemungutan
4. Wajib menggunakan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran yang disediakan Walikotamadia Kepala Daerah
5. Menyimpan dengan baik duplikat Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran tersebut
6. Wajib memperlihatkan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran Pembukuan serta catatan-catatan lain yang diselenggarakan kepada Pejabat / Petugas Fajak yang sedang mengadakan pemeriksaan
7. Wajib membayar pajak yang terutang kepada Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Tingkat sosial adalah status sosial, yaitu kedudukan di dalam masyarakat atau kelompoknya, sering pula disebut posisi sosial. Tiap manusia yang hidup dalam masyarakat pasti mempunyai status, seperti tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Dasar ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat adalah adanya sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Siapa yang memiliki sesuatu yang berharga tersebut dalam jumlah banyak akan mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan.

Hasil proses belajar (pengalaman) yang melatarbelakangi karakteristik individu (pribadi) lebih lanjut menimbulkan sikap individu terhadap rangsangan lingkungan ini menjadi dasar (titik tolak) dalam menentukan alternatif tindakan dan pemeliharaan tindakan. Apabila sikap individu dimanifestasikan ke dalam tindakan (action) yang dapat diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin perilakunya (*Donald Black, 1981 : 1*)

Tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup, mengatasi kebutuhan rohani juga untuk mencapai tujuan obyektif segala realitas dari kehidupan nyata. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dulu dan bertujuan untuk menganiurkan.

mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Hukum diartikan sebagai kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisis ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. (*Adam Podgorski dan Christopher J. Whelan, 1987 : 254*)

Hukum bekerja bila fungsi hukum sebagai kontrol sosial yang berlaku lebih kuat dari kontrol sosial lainnya di luar hukum. Hukum lebih berfungsi di masyarakat. Semakin lemah kontrol sosial lainnya, maka semakin kuat kontrol sosial yang dilakukan oleh hukum (*Donald Black, 1976 : 52*)

Struktur sosial suatu masyarakat dapat digambarkan dengan beberapa dimensi “ Dimensi yang pertama adalah status atau kedudukan yang didasarkan pada kekuasaan, kekayaan materiil, usia kehormatan, pendidikan atau tradisi (*O. Brien, et. Al 1936 : 52*)

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan , yang disebut sebagai keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu (*Satjipto Raharjo, tanpa tahun : 1*)

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa kongkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum bersifat represif dilakukan dalam hal ada perbuatan yang melanggar peraturan (*Siti Sundari Rangkuti, 1993 : 1*)

Pengetahuan hukum merupakan suatu proses dan sikap yang berpangkal pada pengetahuan dan pengertian tentang hukum. Atas dasar nilai-nilai yang dihayati seseorang, kemudian timbul sikap terhadap hukum yang bermuara pada tingkah laku sesuai dengan makna dan fungsi hukum.

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dalam diri manusia sehingga sulit untuk diberi perumusan. Salah satu perumusan yang dapat dijadikan pegangan :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap terhadap peraturan hukum
4. Pola-pola perikelakuan (*Socrjono Soekanto, 1992 : 159*)

Setiap indikator menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai pada tingkat kesadaran hukum yang tertinggi. Dengan adanya indikator-indikator tersebut dapat diketahui apa sesungguhnya yang merupakan kesadaran hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan di Kodya Dati II Semarang terhadap kesadaran hukum dalam menyetorkan Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Dati II Semarang.

D. Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan bahan dan gambaran dalam kenyataan mengenai seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan terhadap kesadaran hukum dalam menyetor Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II Semarang, yang dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara khususnya.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh data yang terbaru dari para Pengusaha Rumah Makan di Kodya Dati II Semarang, yang dapat dipakai sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang. Data mengenai pengaruh tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan terhadap kesadaran hukum dalam menyetor Pajak Pembangunan I, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan masalah-masalah yang berhubungan dengan Pajak Daerah.

E. Metode Penelitian.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (**Socio Legal Research**), yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai norma, tetapi lebih ditekankan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Hukum lebih banyak diteliti secara empiris. Variabel Pengaruh yaitu Tingkat Pendidikan pengusaha Rumah makan di Kodya Dati II semarang. Variabel terpengaruh yaitu Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I.

Definisi Operasi Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan dibedakan menjadi beberapa tingkat yaitu :

- Rendah : dari tidak tamat sekolah dasar sampai tamat dasar, tidak tamat SMP, tamat SMP.
- Sedang : dari tidak tamat SMA sampai dengan tamat SMA.
- Tinggi : dari tidak tamat Akademi / Universitas sampai dengan tamat Akademi/Perguruan Tinggi.

Kesadaran Hukum : adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri pengusaha Rumah Makan tentang hukum tertentu, di mana indikatornya meliputi :

1. Pengetahuan hukum (*law awreness*) : artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum tertentu (skor = 1).
2. Pemahaman hukum (*alawacquaitance*) : artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum tertentu (skor = 2).
3. Sikap hukum (*legal attitude*) : artinya seseorang mempunyai kemampuan mengadakan penilaian terhadap aturan-aturan hukum tertentu (skor = 3).
4. Perilaku hukum (*legal behavior*) : artinya seseorang berperilaku sesuai hukum tertentu yang berlaku (skor = 4).

Tingkat kesadaran hukum adalah :

- a. Rendah : apabila indikator kesadaran hukumnya memiliki skor 1 sampai dengan 3.
- b. Sedang : apabila indikator kesadaran hukumnya memiliki skor 4 sampai dengan 6.

- c. Tinggi : apabila indikator kesadaran hukumnya memiliki skor 7 sampai dengan 10.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Rumah Makan Di Kodya Dati II Semarang, yang meliputi 16 Kecamatan. Mengingat terbatasnya waktu dan dana maka yang dipakai sebagai sampel adalah Pengusaha di 5 Kecamatan saja, dengan cara multistage Random Sampling. Kemudian untuk pengambilan sampel Random Sampling berdasar strata pendidikan.

Sumber data, data primer diperoleh langsung dari para Pengusaha Rumah Makan yang dijadikan Responden di 5 Kecamatan yang dijadikan sampel. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi, buku, hasil-hasil penelitian, makalah dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah Pajak Daerah.

Teknik Pengumpulan data, data primer diperoleh langsung dari responden yaitu para Pengusaha Rumah Makan dengan melalui wawancara dengan disertai daftar pertanyaan. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tabel yang sederhana dan juga perhitungan sederhana, bila diperlukan. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran hukum dalam menyetorkan Pajak Pembangunan I di gunakan perhitungan sederhana berdasarkan skor yang telah ditentukan.

F. Hasil dan Pembahasan.

1. Pendapat Pengusaha Rumah Makan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pembangunan I oleh Petugas.

Mengenai pendapat pemilik Rumah Makan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Pembangunan I oleh Petugas, sebagai berikut : pendapat masyarakat dalam hal ini Pengusaha Rumah Makan terhadap Petugas adalah baik, karena menurut mereka, pelaksanaan pemungutan Pajak Pembangunan I oleh Petugas sesuai dengan yang diatur di

dalam Peraturan Daerah dan dapat dikatakan bahwa para Petugas telah menjalankan perannya dengan baik.

2. Bentuk Bukti Pembayaran dari Pengusaha Rumah Makan kepada Konsumen yang telah makan dan atau minum.

Konsumen yang makan dan minum di Rumah Makan. Mereka diberi bukti pembayaran dimana didalamnya tertera juga bukti pembayaran Pajak Pembangunan I atas makanan dan minuman yang dibelinya.

Bahwa sebagian besar Responden yaitu 52 Responden (86,7%) dalam melakukan bukti pembayaran atas makanan dan minuman kepada konsumen yang beli makanan dan minuman di rumah makanya adalah dengan menggunakan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran yang disediakan oleh Walikotamadya KDH. Sedangkan 8 Responden (13,3%) dalam memberikan bukti pembayaran menggunakan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran yang dibuat oleh Rumah Makan itu sendiri.

3. Pemasangan Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I.

Supaya masyarakat mengetahui akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemungutan pajak bagi orang yang membeli makanan dan minuman di Rumah Makan, maka Walikotamadia KDH memberi Tanda untuk dipasang di Rumah Makan yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu-tamu yang membeli disitu.

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Terhadap Kesadaran Hukum Menyetor Pajak Pembangunan I.

Data yang diperoleh di lapangan kemudian diberi skor baik untuk jawaban dan juga untuk tingkat kesadaran hukumnya sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Hukum Dalam Menyetor Pajak Pembangunan I

Tingkat Pendidikan	Kesadaran Hukum			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	12	6	2	20
Sedang	5	7	8	20
Tinggi	1	6	13	20
Total	18	19	23	60

Dari tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Semarang.

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikannya rendah yang tinggi tingkat kesadaran hukumnya untuk menyetor Pajak Pembangunan I. Sebanyak 5 (8,33%) responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran hukumnya tinggi untuk menyetor Pajak Pembangunan I. Sedangkan yang tingkat pendidikan tinggi sebanyak 13 (21,66 %) responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi untuk menyetor Pajak Pembangunan I.

5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Ketetapan Waktu Menyetor Pajak Pembangunan I.

Tabel 2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Ketetapan Waktu Menyetor Pajak Pembangunan

Tingkat Pendidikan	Kesadaran Hukum			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	15	3	2	20
Sedang	7	7	6	20
Tinggi	3	6	11	20
Total	25	16	19	60

Dari tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah Makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam ketetapan waktu menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang.

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikan rendah yang tinggi kesadaran hukumnya untuk tepat waktu menyetor Pajak Pembangunan I. Sebanyak 6 (10%) responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran hukumnya tinggi untuk tepat waktu menyetor Pajak Pembangunan I. Sedang yang tingkat pendidikan tinggi sebanyak 11 (18,33 %) responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi untuk tepat waktu menyetor Pajak Pembangunan I.

6. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I Dari Konsumen.

Tabel 3. Pengaruh tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah makan Dengan Kesadaran Hukum Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I Dari Konsumen.

Tingkat Pendidikan	Kesadaran Hukum			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	14	4	2	20
Sedang	6	6	8	20
Tinggi	2	4	14	20
Total	22	14	24	60

Dari tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggi tingkat kecenderungan Pengusaha Rumah Makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Menyimpan Bukti Pembayaran dari konsumen yang telah makan dan atau minum di rumah makannya.

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikannya rendah yang tinggi tingkat kesadaran hukumnya untuk menyimpan bukti pembayaran dari konsumen yang telah makan dan atau minum di rumah makannya. Sebanyak 8 (13,33%) responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran hukumnya tinggi untuk

10

menyimpan bukti pembayaran. Sedang yang tingkat pendidikan tinggi sebanyak 14 (23,33%) responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi untuk menyimpan bukti pembayaran dari konsumen yang telah makan dan atau minum di rumah makannya.

7. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I.

Tabel 4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan.

Tingkat pendidikan	Kesadaran Hukum			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	13	4	3	20
Sedang	4	6	10	20
Tinggi	1	4	15	20
Total	18	14	28	60

Dari tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha rumah makan semakin banyak pula yang memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I rumah makannya.

Sebanyak 3 (5%) responden yang tingkat pendidikannya rendah yang tinggi tingkat kesadaran hukumnya untuk memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya. Sebanyak 10 (16,66%) responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran hukum tinggi untuk memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya. Sebanyak 14 (23,33%) responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi untuk memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya.

Tanda pemungutan berupa tulisan yang seragam, dibuat dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Dati II Semarang. Semua rumah makan akan mendapatkan gambar dan tulisan serta bentuk tanda pemungutan Pajak Pembangunan I yang sama dan seragam.

8. Penggolongan Rumah Makan.

Penggolongan/klasifikasi rumah makan di bagi atas rumah makan kelas A, rumah makan kelas B, rumah makan kelas C, rumah makan kelas D.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat simpulkan bahwa :

1. Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah makan juga dipengaruhi oleh adanya tingkat pendidikannya.
2. Dari perhitungan sederhana di dapat hasil bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusaha Rumah makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Semarang, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam ketetapan waktu menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah daerah Tingkat II Kota Semarang, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Menyimpan Bukti Pembayaran dari konsumen yang telah makan dan minum di rumah makannya, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha rumah makan semakin banyak pula yang memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan I di rumah makannya.

2. Saran.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat sarankan sebagai berikut :

Petugas penarikan pajak lebih banyak turun ke lapangan atau ke obyek pajak dapat menilai dan mengawasi kenyataan yang ada. Sehingga dalam menetapkan besarnya pajak akan sesuai dengan besarnya obyek pajak yang harus disetorkan.

DARTAR PUSTAKA

- Black, Donald, The Behavior Of Law, Academic Press New York , 1981, P.I.
- Cole, GDH, Studies In Class Struktur, Ran Easge and Kegan Paul, Brodway House, Central Law, London, 1963.
- Friedman, Lawrence M, The Legal System, A Social Perspective, Russel sage Foundation, New York, 1975.
- Podgorecki, Adam dan Whelan, Christoper, J, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rasjidi, Lili, dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985.
Bandung, 1991
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- -----, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.
- -----, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980.
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali, Press 1982.
- -----, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta Tanpa Tahun.
- -----, Beberapa teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rochmat, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1988.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Kumpulan Tulisan, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 1993/1994.